



DPPPAPPKB KAB. TEMANGGUNG

Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218

Telepon/Faximili (0293) 491059 surat elektronik: dpppappkb@temanggungkab.go.id

laman: dpppappkb.temanggungkab.go.id

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA**

TAHUN 2027

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN

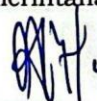
**RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

TAHUN 2027

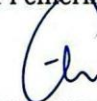
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

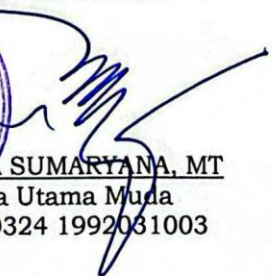

EWIEK KHAVIDA S.STP, M.M.
NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan


RIMA ADHI HAPSARI S.Sos.
NIP. 19971019 202202 2 002

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG




Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 1992031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung Tahun 2027.

Renja DPPPAPPKB Tahun 2027 disusun untuk menjabarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja DPPPAPPKB Tahun 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2027 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk dilakukan *review*.

Akhirnya kami berharap semoga Renja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2027 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pencapaian visi pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 24 Juli 2026

KEPALA DPPPAPPKB



DRA. GEMA ARTISTI WAHYUDI, M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700730 199001 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang.....1

 1.2. Landasan Hukum.....7

 1.3. Maksud dan Tujuan.....10

 1.4. Sistematika Penulisan.....10

BAB II..... 11

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 11

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2025 dan
 Capaian Renstra DPPPAPPKB Tahun 2025-2029.....11

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB30

 2.1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD).....30

 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB..63

 2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD66

 2.5. *Review* terhadap rancangan awal RKPD67

 2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....75

 2.7. Inovasi Perangkat Daerah75

 2.8. Penghargaan76

BAB III..... 77

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 77

 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....77

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPPPAPPKB.....78

 3.3. Program dan Kegiatan DPPPAPPKB81

 4.1 Program dan Kegiatan.....133

BAB V..... 140

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 140

 5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027140

 5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027140

BAB VI..... 143

PENUTUP 143

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB
Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d
Tahun 2026 12

Tabel 2. 2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama DPPPAPPKB 31

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Indikator Program 32

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten
Temanggung 34

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten
Temanggung 34

Tabel 2. 6 Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027 67

Tabel 2. 7 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027 69

Tabel 2. 8 Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku
Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Temanggung..... 75

Tabel 2. 9 Daftar Inovasi Perangkat Daerah..... 75

Tabel 2. 10 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2026 76

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2027 79

Tabel 3. 2 Rencana Program dan Kegiatan DPPPAPPKB Kab.
Temanggung Tahun 2027 82

Tabel 4. 1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan DPPPAPPKB
Kab. Temanggung Tahun 2027 134

Tabel 5. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 140

Tabel 5. 2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 141

Tabel 4.1 134

Tabel 5.1 140

Tabel 5.2 141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

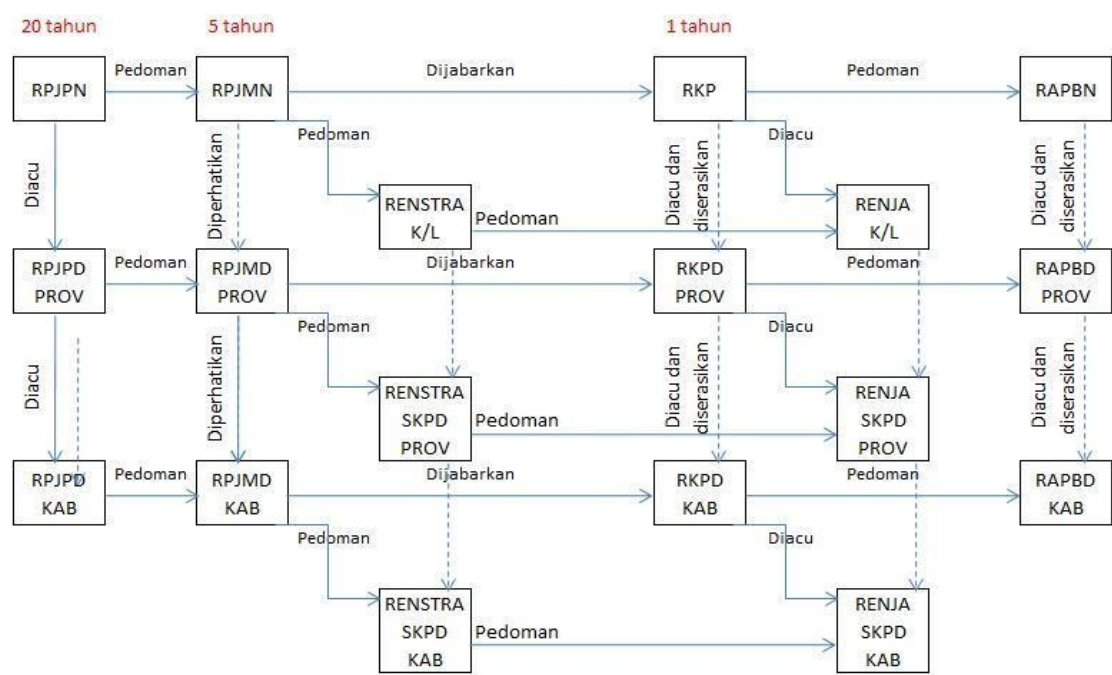
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB) Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja DPPPAPPKB Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPPPAPPKB Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPPPAPPKB, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal DPPPAPPKB yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan DPPPAPPKB;
- 2) Kondisi pelayanan DPPPAPPKB;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB ;
- 4) Data Pokok Pembangunan DPPPAPPKB;

- 5) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 6) Informasi lain terkait pelayanan DPPPAPPKB.

b. Analisis gambaran pelayanan DPPPAPPKB;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan DPPPAPPKB adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan DPPPAPPKB.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra DPPPAPPKB untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DPPPAPPKB.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun lalu berdasarkan Renstra DPPPAPPKB;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPPPAPPKB. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- 4) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025;

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra DPPPAPPKB dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra

DPPPAPPKB tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra DPPPAPPKB

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra DPPPAPPKB
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra DPPPAPPKB sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB], dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra DPPPAPPKB

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DPPPAPPKB dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPPPAPPKB ;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPPPAPPKB;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPPPAPPKB
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DPPPAPPKB.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPPPAPPKB.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPAPPKB

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB;

Penyusunan dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana,

daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja DPPPAPPKB;

Penyempurnaan rancangan Renja DPPPAPPKB perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

1. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja DPPPAPPKB dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah

Dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPPPAPPKB Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi DPPPAPPKB] Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPPPAPPKB untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPPPAPPKB] Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB selama kurun waktu Tahun 2027;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2027;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja DPPPAPPKB Tahun 2027; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) DPPPAPPKB Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja DPPPAPPKB Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2025 dan Capaian Renstra DPPPAPPKB Tahun 2025-2029

Dalam melakukan penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2025 terhadap capaian Renstra DPPPAPPKB Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja DPPPAPPKB sampai dengan tahun berjalan terhadap target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap capaian Renstra DPPPAPPKB] Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan dengan menggunakan capaian kinerja Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra DPPPAPPKB 2025-2029.

Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPAPKB Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Targrt Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		
				Rp	Rp		K	Rp (DPA)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12= 10/8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK							4.473.125.994		5.139.000	
XXX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4.380.625.994		1.128.473.081	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	%	100	98,34	98,34	100	4.380.625.994	23	1.128.473.081	23,00
20801202	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12	12	100	12	3.530.792.533	3	949.970.692	
2080120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12	100	12	3.530.792.533	3	949.970.692	25,00
20801206	Administrasi Umum Perangkat Daerah			12	12	100	12	57.382.044		306.000	0,53
2080120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	100	12	1.500.000	3	-	25,00
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	12	12	100	12	5.000.000	3	-	25,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Targrt Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		
				Rp	Rp		K	Rp (DPA)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12= 10/8
208.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	6	6	100	12	10.000.000	3	-	25,00
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	6	6	100	6	6.000.000	3	-	50,00
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	100	12	9.082.044	3	306.000	25,00
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	100	12	25.800.000	0	-	-
20801208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	12	100	12	726.551.417	3	175.826.389	25,00
2080120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	100	12	5.000.000	3	320.000	25,00
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	100	12	34.500.000	3	6.434.771	25,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Targrt Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		
							K	Rp (DPA)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12= 10/8
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100	12	687.051.417	3	169.071.618	25,00
20801209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23				65.900.000		2.370.000	
2080120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	2	2	100	2	15.000.000	2	1.900.000	100
2.08.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	76	73	96,05	69	35.900.000	27	470.000	39,13
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	100	2	10.000.000	0	-	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Targrt Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		
				Rp	Rp		K	Rp (DPA)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12= 10/8
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	100	2	5.000.000	0	-	0,00
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							23.500.000		0	-
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,21	10,49	100	9,7		8,44		87,01
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,3	3,02	100	2,35		2,97		100
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			46	46	100	46	3.500.000	46	-	-
2.08.02.2.01.0013	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	46	46	100	46	3.500.000	46	-	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Targrt Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		
				Rp	Rp		K	Rp (DPA)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12= 10/8
		Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			40	40	100	40	20.000.000	40	-	-
2.08.02.2.03.0008	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	40	40	100	40	20.000.000	40	-	100
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							3.500.000		-	-
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	%	100	100	100	100		100		100
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	angka	5,62	5,39	95,85	5,15		0,73		100
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			5	5	100	5	3.500.000	0	-	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Targrt Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		
				Rp	Rp		K	Rp (DPA)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12= 10/8
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan	5	5	100	5	3.500.000	0	-	0
02.08.03	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							20.000.000		-	0
		Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	%	69,23	68,38	98,77	73,08		65,38		89,46
20804202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			40	40	100	40	20.000.000	0	-	0
2.08.04.2.02.0007	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan kabupaten	orang	40	40	100	40	20.000.000	0	-	0
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							42.000.000		5.139.000	
		Kabupaten Layak Anak	kategori	701 (Madya)	612,8 (Madya)	87,42	701 (Madya)		612,8 (Madya)		87,42
		Persentase terbentuknya DRPPA	%	2,47	6,57	100	30,1		6,57		21,84

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Targrt Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		
				Rp	Rp		K	Rp (DPA)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12= 10/8
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			25	30	100	30	42.000.000	30	5.139.000	
2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	anak	25	30	100	30	42.000.000	30	5.139.000	100
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							3.500.000		-	
		Indeks Perlindungan Anak	angka	62,2	61,62	99,07	63,2		61,62		97,5
		Persentase pernikahan usia anak	%	0,05	0,11	100	0,92		0,13		100
		Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani	0	100	100	100	100		100		100
		Rasio kasus kekerasan terhadap anak	angka	8,79	8,93	100	8 ,48		1,36		100
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Orang	289	289	100	289	3.500.000		-	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Targrt Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		
							K	Rp (DPA)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12= 10/8
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	289	289	100	289	3.500.000	0	-	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA								6.851.127.825			
21402	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							249.000.000		-	
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	58,7	60,1	100	58,8		60,1		100
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	%	7,44	7,59	100	7 ,58		7,71		98,44
		Median usia kawin pertama (MUKP)	%	19,9	22	100	20,1		22		100
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)	%	4,01	9,32	100	9,22		4,01		100
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		laporan	12	12	100	12	249.000.000		-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Targrt Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		
							K	Rp (DPA)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12= 10/8
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan	12	12	100	12	173.400.000	3	-	25
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokumen	12	12	100	12	75.600.000	3	-	25
02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							2.369.821.000		278.441.374	
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	5	46,7	48,68	100	46,95		48,2		100
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	%	77,77	82,54	100	77,8		80,24		100
		Persentase KB pasca persalinan	%	57,4	52,09	90,75	59,9		80,24		100
		Persentase kampung keluarga berkualitas mandiri	%	15,22	15,57	100	15,22		16,61		100
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							802.600.000		104.991.374	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Targrt Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		
				Rp	Rp		K	Rp (DPA)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12= 10/8
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	12	12	100	12	747.600.000	3	104.991.374	25
2140320113	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	dokumen	12	12	100	12	15.000.000	3	-	25
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi	15	15	100	15	40.000.000	15	-	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Targrt Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		
							K	Rp (DPA)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12= 10/8
21403202	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				1.933,00		1.933	46.784.000	-	-	-
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	kader	1.933	1.933	100	1933	46.784.000	0	-	-
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						6.132	1.505.437.000	3	173.450.000	0
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk jaringan dan jaringannya	laporan	12	12	100	12	56.700.000	3	-	25
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	6.120	6.116	99,93	6120	1.448.737.000	3750	173.450.000	61,27
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam						68	15.000.000	68	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Targrt Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		
							K	Rp (DPA)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12= 10/8
	Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasipengelolaan dapur sehat atasi stunting (DASHAT) di kampung keluarga berkualitas	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	dokumen	2	2	100	2	15.000.000	0	-	-
02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							4.232.306.825		96.831.000	
		Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	%	45,56	50,23	100	45,75		40,28		88,04
		Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	angka	87,3	86,8	99,43	87,4		86,8		99,31
		Indeks lansia berdaya	angka	57,9	75,9	100	58		75,9		100
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							169.966.000		-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Targrt Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		
				Rp	Rp		K	Rp (DPA)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12= 10/8
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah kelompok yang mendapatkan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	keompok	-	-	-	250	169.966.000	0	-	0
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							4.062.340.825		96.831.000	
2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	organisasi	3	3	100	1	42.940.825	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Targrt Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		
				Rp	Rp		K	Rp (DPA)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12= 10/8
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	%	100	93	93	100	1.278.900.000	80	96.831.000	80
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingann	keluarga	91.256	90.206	98,85	12	2.740.500.000	3	-	25

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2026

Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPPAPPKB di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPPAPPKB berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah sebagai berikut:
 - Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani, dengan capaian 100%
 - Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani, dengan capaian 100%
 - b. Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah sebagai berikut :
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG,dengan capaian 100%
 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota. dengan capaian 100%
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota , dengan capaian 100%.
 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota,dengan capaian 100%
 - Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA,dengan capaian 100%
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga, dengan capaian 100%
 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, dengan capaian 100%
 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, dengan capaian 100%

- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana, dengan capaian 100%
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan capaian 100%
 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, dengan capaian 100%
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), dengan capaian 100%
 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan capaian 100%
 - Fasilitas pengelolaan dapur sehat atasi stunting (DASHAT) di kampung keluarga berkualitas, dengan capaian 100%
 - Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas dengan capaian 100%
 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), dengan capaian 100%
 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)), dengan capaian 100%
 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga, dengan capaian 100%
2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
- a. Realisasi program yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
- Persentase ARG pada belanja langsung APBD, dengan capaian 100,00%.
 - Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah, dengan capaian 100,00%
 - Persentase terbentuknya DRPPA, dengan capaian 100%
 - Persentase pernikahan usia anak, dengan capaian 100%

- Rasio kasus kekerasan terhadap anak, dengan capaian 100%
 - Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), dengan capaian 100%
 - Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*), dengan capaian 100%
 - Median usia kawin pertama (MUKP), dengan capaian 100%
 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*age specific fertility rate*/ASFR 15-19 tahun), dengan capaian 100%
- b. Realisasi kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, untuk realisasi kegiatan yang melebihi target di tahun 2025, di DPPPAPPKB tidak ada
3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
- a. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
- Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan), dengan capaian 95,91%
 - Kabupaten Layak Anak, dengan capaian 87,42%
 - Indeks Perlindungan Anak, dengan capaian 99,07
 - Persentase KB pasca persalinan, dengan capaian 90,75%
 - Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja, dengan capaian 99,43%
- b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dengan capaian 99,93%
 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita), dengan capaian 93,00%.
 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita), dengan capaian 98,8%
4. Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM, seperti Penyuluh KB
 - b. Keterbatasan anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal
 - c. Koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah belum berjalan optimal
 - d. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan Bangga Kencana masih belum maksimal
 - e. kebijakan pemerintah pusat atau daerah yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, terutama dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, karena yang ada diukonis tidak bisa implementasi dalam proses perencanaan
 - f. Data sasaran belum sepenuhnya akurat sehingga mempengaruhi ketepatan intervensi program
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:
- a. Belum tercapainya sebagian target kinerja berpotensi menghambat pencapaian sasaran dan indikator Renstra DPPAPPKB;
 - b. Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, capaian yang belum optimal dapat memengaruhi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak;
 - c. Pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, keterbatasan pelaksanaan program dapat memengaruhi pencapaian indikator pembangunan keluarga, pelayanan KB, dan pengendalian penduduk;
 - d. Indikator yang telah mencapai atau melampaui target memberikan kontribusi positif terhadap percepatan pencapaian target Renstra secara keseluruhan; dan
 - e. Diperlukan penguatan perencanaan, koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan data yang akurat, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan target akhir Renstra dapat tercapai.

- 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.:
 - a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. Mengoptimalkan alokasi anggaran pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Renstra serta melakukan efisiensi terhadap kegiatan yang kurang prioritas.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa DPPPAPPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **99,02%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

- 1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kesenjangan Gender, dengan capaian 99,96%, kategori Sangat Tinggi;
- 2. Sasaran Strategis 2: Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, dengan capaian 100%, kategori Sangat Tinggi;
- 3. Sasaran 3: Mewujudkan keluarga kecil berkualitas, dengan capaian 100%, kategori Sangat Tinggi;
- 4. Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah, dengan capaian 100%, kategori Sangat Tinggi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kunci. Adapaun penjelasan masing-masing indikator tercantum pada tabel 2.2-2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Kinerja Utama DPPPAPPKB

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW I 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
			2025	2026	2027	2026			ST	T	S	R	SR
1	Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,21	0,201	0,172	0,22	91,36	v					
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	Angka	63.98	64,79	65.6	73	100	v					
3	Indeks Pemberdayaan Gender	angka	74,31	74,35	74,8	74,28	99,91	v					
4	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	v					
5	TFR (<i>Total Fertility Rate</i> /Angka Kelahiran Total)	angka	2.18	2,17	2,16	1,24	100	v					
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	0.79	0,78	0,77	0,77	100	v					
7	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	71,65	71,66	71,97	71,65	99,99	v					
8	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	85,20	85,45	85,92	85,29	99,81	v					

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Indikator Program

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW I 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
			2025	2026	2027	2026		ST	T	S	R	SR
A.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	INDIKATOR PROGRAM											
	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan											
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,21	9,7	10	8,44	87,04		v			
2	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,3	2,35	2,4	2,97	100,00	v				
	Program Perlindungan Perempuan											
3	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	%	100	100	100	100	100,00	v				
4	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	angka	5,39	5,15	4,9	0,73	100,00	v				
	Program Peningkatan kualitas Keluarga											
5	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	%	69.23	73,08	84.61	65,38	89,46			v		
	Program Pemenuhan Hak Anak											
6	Kabupaten Layak Anak	kategori	Madya	Madya	Nindya	87,42	87,42		v			
7	Persentase terbentuknya DRPPA	%	2,47	30,1	43.94	6,57	21,84					v
	Program Perlindungan Khusus Anak											
8	Indeks Perlindungan Anak	angka	62.2	63,2	64,7	61,62	97,50	v				
9	Persentase pernikahan usia anak	%	0.105	0,092	0.094	0,013	100,00	v				
10	Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani	%	100	100	100	100	100,00	v				
11	Rasio kasus kekerasan terhadap anak	angka	8.93	8,48	8.03	1,36	100,00	v				
B.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	INDIKATOR PROGRAM											
	Program Pengendalian Penduduk											
1	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	58.7	58,8	58.9	60,1	100,00	v				

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja	Capaian s.d TW I 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
			2025	2026	2027	2026		ST	T	S	R	SR
2	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	%	7.59	7,58	7,57	7,71	98,31	v				
3	Median usia kawin pertama (MUKP)	angka	19,9	20,1	20.2	22	100,00	v				
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)	%	9.32	9,22	9.09	4,01	100,00					v
Program Pembinaan KB												
5	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	46.7	46,95	47,2	48,20	100,00	v				
6	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	%	77,7	77,8	78,25	82,71	100,00	v				
7	Persentase KB pasca persalinan	%	52,42	59,9	68,1	80,24	100,00	v				
8	Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	%	15,22	15,91	16,6	16,61	100,00	v				
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)												
9	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	%	45,56	45,75	45,95	40,28	88,04		v			
10	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	angka	87,3	87,4	87,5	86,8	99,31	v				
11	Indeks lansia berdaya	angka	57,9	58	58,1	75,9	100,00	v				

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja
			2025	2026	2027	2025	2026		(ST/T/SEDANG/R/SR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK									
INDIKATOR SPM									
	NIHIL								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB									
INDIKATOR SPM									
	NIHIL								

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja
			2025	2026	2027	2025	2026		(ST/T/SEDANG/R/SR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK									
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)									
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,21	9,70	10,00		8,44	87,04	T

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja
			2025	2026	2027	2025	2026		(ST/T/SEDANG/R/SR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Rasio anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	angka	8,93	8,48	8,03		1,36	100,00	ST
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	angka	5,39	5,15	5,39		0,73	100,00	ST
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB									
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)									
	TFR (Angka Kelahiran Total)	angka	2,18	2,17	2,16		1,24	100,00	ST
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	77,7	77,8	76,7		82,71	100,00	ST
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,59	7,58	7,57		7,71	98,31	ST

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2026

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU DPPPAPPKB sampai triwulan 1 tahun 2026 sebagai berikut :

1. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki laki dalam 3 dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja (Publikasi “Pembangunan Manusia Berbasis Gender” Tahun 2023 oleh Kementrian PPPA).

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ini merupakan ukuran yang menunjukkan ketimpangan atau kesenjangan antara laki laki dan perempuan dalam mencapai pembangunan manusia di 3 (tiga) dimensi utama yaitu:

- a. Kesehatan Reproduksi diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Remaja (AKTR);
- b. Pemberdayaan diukur melalui persentase kursi parlemen yang diduduki perempuan;
- c. Partisipasi Ekonomi, diukur menurut tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) antara laki laki dan perempuan.

Capaian Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 0,22 atau 99,36% dari target 0,21, dengan kategori sangat tinggi, Capaian Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Faktor Pendorong:
 - a) akses pendidikan yang merata;
 - b) Peningkatan partisipasi kerja perempuan;
 - c) Peran aktif perempuan pada organisasi masyarakat.
- 2) Faktor Penghambat:
 - a) Norma budaya dan stereotip gender tradisional;
 - b) Masih tingginya kekerasan berbasis gender.
- 3) Rencana tindak lanjut:
 - a) Memperkuat peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang); dan

- b) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender.

2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)I adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga. (Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan).

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)I menggunakan pendekatan dimensi yang dibentuk dari 17 Variabel, 3 dimensi yang ditentukan mencakup:

- a. Dimensi Ketentraman;
- b. Dimensi Kemandirian; dan
- c. Demensi Kebahagiaan.

Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)I Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 73 atau 100% dari target 64,79, dengan kategori sangat tinggi, Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1) Faktor Pendorong

Meningkatnya kondisi ekonomi, sosial, dan tingkat pendidikan dalam keluarga yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan keluarga.

2) Faktor Penghambat

Masih lemahnya pemahaman keluarga terhadap indikator-indikator peningkatan kesejahteraan keluarga.

3) Rencana tindak lanjut

Meningkatkan pemahaman terkait mekanisme dan indikator perhitungan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), mengingat proses perhitungan indeks tersebut bukan merupakan kewenangan langsung Perangkat Daerah.

3. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan

(Publikasi “Pembangunan Manusia Berbasis Gender” Tahun 2023 oleh Kementrian PPPA).

IDG dihitung melalui tiga dimensi utama, yaitu:

- a. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik, diukur melalui persentase perempuan di DPRD;
- b. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, diukur melalui proporsi perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, dan manajer; dan
- c. Kemandirian ekonomi perempuan, diukur melalui rata-rata upah perempuan terhadap laki-laki serta tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut jenis kelamin.

Metode perhitungan dilakukan dengan menormalkan nilai masing-masing indikator menjadi indeks 0–100, kemudian dihitung rata-rata geometrik antar dimensi untuk memperoleh nilai IDG secara keseluruhan.

Nilai IDG menunjukkan tingkat pemberdayaan perempuan semakin tinggi nilai (mendekati 100), semakin tinggi pula tingkat partisipasi dan kemandirian perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 74,28 atau 99,91 % dari target 74,35, dengan kategori sangat tinggi, Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1) Faktor pendorong:

- Komitmen pemerintah dalam keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan, perempuan selaku manajerial;
- Akses pelatihan kerja bagi perempuan (pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK).

2) Faktor Penghambat:

- Turunnya partisipasi perempuan di DPRD yang saat ini hanya 20%, turun 10% dibandingkan periode tahun sebelumnya;
- Kesenjangan upah perempuan dibandingkan laki laki lebih rendah;
- Stereotip gender dan budaya patriaki masih kuat.

3) Rencana tindak lanjut

- Memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam proses perencanaan (musrenbang);

- Pelatihan UMKM bagi perempuan bekerja sama dengan organisasi perempuan.

4. Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak

Digunakan untuk mengukur efektivitas penanganan kasus kekerasan oleh lembaga layanan atau perangkat daerah terkait. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus yang berhasil ditangani dengan jumlah kasus yang dilaporkan dalam satu periode pelaporan, sesuai standar pelayanan. (Peraturan Menteri PPPA tentang Standar dan Jenis Layanan bagi Korban Kekerasan).

Capaian Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 100% dari target 100 , dengan kategori sangat tinggi, Capaian Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Faktor pendorong: kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.
- b. Faktor Penghambat: Keterbatasan jumlah dan kemampuan pendamping dan petugas.
- c. Rencana tindak lanjut: Pengoptimalkan satgas DRPPA dalam pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak dan terbentuknya UPTD PPA

5. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menurut UU No 52 Tahun 2009 adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 0,77 atau 100% dari target 0,79 , dengan kategori sangat tinggi, Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya;

- a. Faktor Pendorong adalah: Meningkatnya KIE kepada masyarakat tentang Pengendalian penduduk.
- b. Faktor Penghambat adalah: Masih tingginya angka kelahiran (CBR).

6. TFR (*Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total*)

TFR (*Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total*), yaitu banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15–49 tahun selama periode tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15–49 tahun pada periode yang sama.

Capaian TFR (*Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total) Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 1,24 atau 100% dari target 2,17, dengan kategori sangat tinggi, Capaian TFR (*Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total) di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Faktor sosial budaya
 - Penundaan usia perkawinan;
 - Perubahan nilai budaya dari nilai tradisional menuju individualistik;
 - Gaya hidup urban, banyak anak banyak beban hidup di kota.
- b. Faktor Ekonomi
 - Tingginya biaya hidup, dengan tinggi biaya pendidikan, perumahan dan kesehatan, dan orang cenderung mempunyai anak sedikit;
 - Perempuan pekerja, perempuan yang aktif secara ekonomi cenderung menunda atau membatasi jumlah anak.

B. INDIKATOR PROGRAM

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator sasaran strategis, maka perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut terhadap capaian indikator program sebagai bentuk keterkaitan antara perencanaan strategis dengan pelaksanaan program. Adapun capaian indikator program itu adalah:

1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarustamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan ini untuk Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan..Program ini dipengaruhi oleh 2 indikator yaitu :

a. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD

Persentase ARG pada belanja langsung adalah proposi anggaran yang mengintegrasikan analisis gender (ARG) dalam program dan kegiatan terhadap total belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada waktu tahun tertentu.

Untuk memperoleh angka Persentase ARG pada belanja langsung APBD dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari persentase jumlah anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD dibandingkan dengan jumlah anggaran belanja langsung APBD secara

keseluruhan dikalikan 100. Capaian Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD.Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 8,44 atau 87,04% dari target 9,7, dengan kategori tinggi, Capaian Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1) Faktor Pendorongnya adalah:

- Telah dilaksankanya pembekalan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Anggaran Resposif Gender dalam proses perencanaan;
- Telah disyaratkan sebagai dokumen yang harus direview oleh Inspektorat dalam penyusunan RKA.

2) Faktor Penghambatnya adalah:

- Perencana dan pengelola anggaran belum memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep gender dan bagaimana menerapkan dalam anggaran;
- Implementasi ARG sangat bergantung pada dukungan dan komitmen dari pimpinan lembaga atau daerah, tanpa dukungan ini ARG, hanya menjadi formalitas;
- Beberapa pihak menganggap ARG hanya sebagai beban administrasi tambahan, bukan bagian penting dari perencanaan yang berkualitas.

b. Persentase keterwakilan perempuan di Lembaga Pemerintah

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga adalah partisipasi angkatan kerja perempuan yang dapat dilihat dari jumlah semua angkatan kerja perempuan baik disektor swasta maupun sektor pemerintah. Sedangkan definisi dari keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada sektor pemerintah.

Rumus : jumlah keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah dibanding jumlah perempuan pada angkatan kerja kali 100%.

Capaian Persentase keterwakilan Perempuan pada lembaga pemerintah Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 2,97 atau 100% dari target 2,35, dengan kategori sangat tinggi, Capaian Persentase keterwakilan Perempuan pada lembaga pemerintah. di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1) Faktor Pendorongnya : Tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada

perempuan memperluas peluang untuk bekerja dilembaga pemerintah.

2) Faktor Penghambat adalah:

- Budaya Patriarki yang menganggap laki laki lebih layak memimpin;
- Ketimpangan akses terhadap informasi politik dan pemerintahan bagi perempuan.

2. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan ini untuk Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak perempuan. Program ini dipengaruhi oleh 2 indikator yaitu :

a. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani

Kasus kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi (UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Rumus: Jumlah kekerasan yang dialami perempuan yang tertangani dibagi jumlah kasus terhadap perempuan yang melapor dibagi yang ada kali 100%.

Capaian Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani Kabupaten Temanggung sampai Triwulan I Tahun 2026 tercapai 100%, karena semua kasus yang melapor semua tertangani sesuai SOP yang ada, Capaian Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani. di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Faktor Pendorong: Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.
- 2) Faktor Penghambat: Keterbatasan jumlah dan kemampuan pendamping dan petugas.
- 3) Rencana tindak lanjut: Optimalisasi satgas DRPPA dalam pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan perempuan

b. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Kasus kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Rumus: Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah perempuan yang ada kali 100.000 (per 100.000 perempuan). Capaian Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 0,73 atau 100% dari target 5,15. Capaian Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1) Faktor Pendorongnya adalah:

- Semakin meningkatnya pemahaman orang tua dan anak tentang perlindungan anak perempuan;
- Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.

2) Faktor Penghambatnya adalah: Kurangnya pemahaman masyarakat atas hak anak dan perlindungan anak.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga ini untuk Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender. pemenuhan hak. serta perlindungan perempuan dan anak. Program ini dipengaruhi oleh 2 indikator yaitu :

a. Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas

Salah satu upaya Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Untuk mendukung keberhasilan gerakan tersebut, juga didukung oleh pelayanan ramah anak dan perempuan di bidang perumahan, serta pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas.

Rumus Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas: Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan ramah anak dibagi jumlah

puskesmas yang ada dikalikan 100%. Capaian Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas.Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 65,38 atau 89,46% dari target 73,08, Capaian Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas.di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Faktor pendorong : Adanya komitmen manajemen puskesmas dan rumah sakit untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan hak-hak anak.
- 2) Faktor Penghambat : Belum adanya kebijakan yang jelas dari manajemen rumah sakit/puskesmas untuk menerapkan standar ramah anak.

4. Program Pemenuhan Hak Anak

Program Pemenuhan Hak anak ini untuk terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif program ini dipengaruhi oleh 2 indikator yaitu :

a. Kabupaten Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak (Permen PPPA No 11 Tahun 2011).

Indikator-indikator Kecamatan Layak Anak minimal memuat 5 cluster hak anak yaitu :

- 1) Hak sipil dan kebebasan lingkungan keluarga;
- 2) Pengasuhan alternatif;
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
- 5) Perlindungan khusus.

Untuk mengukur keberhasilan KLA dapat dilihat dari kategori yang diperoleh Kabupaten terhadap evaluasi dan penilaian Kabupaten Layak Anak, dimana kategori tersebut meliputi: Pratama, Madya, Nindya dan Utama. Adapun ukuran penilaian perkategori adalah :

- Kategori Pratama dengan nilai : 500 – 600
- Kategori Madya dengan nilai : 601 – 700
- Kategori Nindya dengan nilai : 701 – 800
- Kategori Utama dengan Nilai : 801 – 900

Capaian Kota Layak Anak di puskesmas.Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai madya dari target Madya, namun dari nilan yang diperoleh belum sesuai yang diharapkan karena tidak memenuhi nila maksimal. Adapun realisasi nila sebesar 612 dari yang seharusnya 701 atau 87,42%. Capaian Kota layak anak di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Faktor pendukungnya adalah adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak).
- 2) Faktor penghambatnya adalah masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana (Kecamatan Layak Anak), belum semua Kecamatan terbentuk Forum Anak.

b. Persentase terbentuknya DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak)

Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) adalah desa atau kelurahan yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022).

Tujuan pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) adalah untuk:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak melalui pembangunan desa/kelurahan yang berkeadilan gender dan peduli terhadap pemenuhan hak anak;
- 2) Menghapus berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di tingkat desa/kelurahan;
- 3) Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dan anak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan di tingkat desa/kelurahan;
- 4) Mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah desa/kelurahan serta masyarakat;
- 5) Mewujudkan desa/kelurahan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi perempuan dan anak.

Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi DRPPA meliputi:

- 1) Terpenuhi hak-hak perempuan dan anak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial;
- 2) Tersedianya kelembagaan dan regulasi desa/kelurahan yang responsif gender dan peduli anak;
- 3) Meningkatnya kapasitas pemerintah desa/kelurahan dalam mengarusutamakan gender dan hak anak dalam pembangunan;
- 4) Terwujudnya lingkungan sosial yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- 5) Tumbuhnya partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan.

Capaian Persentase terbentuknya DRPPA Kabupaten Temanggung sampai Triwulan I Tahun 2026 tercapai 6,57 atau 21,84%. Capaian ini dengan kategori Sangat Rendah. Capaian persentase terbentuknya DRPPA di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- 1) Faktor Pendorong: Sudah terbentuknya kader PPPA di semua desa
- 2) Faktor Penghambat: Kurangnya pemahaman perangkat desa tentang isu gender dan perlindungan anak
- 3) Rencana Tindak Lanjut:
 - Menyusun/menetapkan Perbup/Perdes tentang desa PPA
 - Mengintegrasikan dengan Kecamatan Berdaya

5. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak ini untuk Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak program ini dipengaruhi oleh 4 indikator yaitu :

a. Indeks Perlindungan Anak

Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Indikator yang menggambarkan pencapaian hak hak anak, dan perlindungan khusus anak . Indeks ini biasanya disusun dari beberapa sub-indeks dan indikator yang mencerminkan:

- Hak atas identitas (misalnya kepemilikan akta kelahiran).
- Hak pengasuhan dan lingkungan keluarga.

- Hak kesehatan dasar.
- Hak pendidikan.
- Perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi.

Semakin tinggi nilai IPA, semakin baik tingkat perlindungan anak di daerah. Capaian Indek Perlindungan anak di .Kabupaten Temanggung sampai Triwulan I Tahun 2026 tercapai 61,62 atau 97,50%, dari target 63,2. Capaian ini dengan kategori sangat tinggi Capaian Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1) Faktor Pendorong:

- Adanya kerjasama lintas sektor (pendidikan, kesehatan, sosial, kepolisian, dan desa)
- Tersedianya layanan pengaduan dan penanganan kasus

2) Faktor Penghambat: Masih terjadi kasus kekerasan, pernikahan anak, eksploitasi, dan penelantaran.

3) Rencana Tindak Pengendalian: Optimalisasi UPTD PPA untuk layanan pengaduan, pendampingan, dan rujukan kasus.

b. Persentase pernikahan usia anak

Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk pernikahan yang terjadi menurut hukum negara, hukum adat, maupun agama, atau hidup bersama layaknya suami istri meskipun tanpa pencatatan resmi Buku Panduan Pencegahan Perkawinan Anak (KemenPPPA, 2020)

Rumus persentase pernikahan usia anak : Jumlah anak yang menikah dibawah usia 18 tahun dibagi jumlah total anak dalam kelompok usia tersebut dikali 100%. Capaian Persentase pernikahan usia anak di Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 0,013 atau 100%, dari target 0,105. Capaian ini dengan kategori sangat tinggi Capaian persentase pernikahan usia anak.di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- 1) Faktor Pendorong : Peran aktif masyarakat, PKK, forum anak, PATBM, terkait kampanye Jo Kawin Bocah.
- 2) Faktor penghambat : Budaya patriarki dan normalisasi kekerasan.
- 3) Rencana Tindak Lanjut : Penguatan koordinasi lintas sektor (sekolah, kesehatan, hukum, sosial)

c. Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani

Digunakan untuk mengukur efektivitas penanganan kasus kekerasan anak oleh lembaga layanan atau perangkat daerah terkait.

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus anak yang berhasil ditangani dengan jumlah kasus anak yang dilaporkan dalam satu periode pelaporan.

Rumus Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani, adalah $\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan anak yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus kekerasan anak yang melaporkan}} \times 100\%$.

Capaian persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani di kabupaten Temanggung sampai Triwulan 1 Tahun 2026 tercapai 100%, karena semua kasus anak yang melapor 100% ditangani sesuai SOP yang ada. Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- 1) Faktor Pendorong: Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.
- 2) Faktor Penghambat: Keterbatasan jumlah dan kemampuan pendamping dan petugas
- 3) Rencana Tindak Lanjut: Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping

d. Rasio kasus kekerasan terhadap anak

Rasio kasus kekerasan terhadap anak adalah angka yang menunjukkan Perbandingan antara jumlah kasus yang dialami anak dalam 1 tahun tertentu dengan jumlah total penduduk anak. Rumus Rasio kasus kekerasan terhadap anak adalah: $\frac{\text{Jumlah anak di wilayah tersebut}}{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap anak}} \times 100.000$ penduduk anak. Capaian Rasio kasus kekerasan terhadap anak Capaian Rasio kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 1,36 atau 100%, dari target 8,48. Capaian ini dengan kategori sangat tinggi. Capaian Rasio kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1) Faktor Pendorong adalah :

- Adanya regulasi dan kebijakan nasional yang mengatur perlindungan terhadap anak;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak;
- Adanya layanan pengaduan kekerasan terhadap anak, lewat Aplikasi SIPESAN PERAK;
- Keterlibatan berbagai sektor hukum, pendidikan, kesehatan, sosial, dan agama dalam menangani kasus anak.

2) Faktor Penghambat adalah:

- Kurangnya dan kesadaran masyarakat tentang hak hak anak;
- Keterbatasan jumlah dan kemampuan pendamping dan petugas.

6. Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk ini untuk terkendalinya pertambahan jumlah penduduk program ini dipengaruhi oleh 4 indikator yaitu :

a. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Indek Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), adalah indek komposif yang menggambarkan sejauh mana variabel-variabel kependudukan telah diartustamakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan aspek kependudukan, meliputi dimensi pemerataan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta kualitas hidup penduduk. Capaian Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 60,1 atau 100%, dari target 58,8. Capaian ini dengan kategori sangat tinggi Capaian Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1) Faktor Pendorong

- Penundaan usia perkawinan;
- Perubahan nilai budaya dari nilai tradisional menuju individualistik;
- Gaya hidup urban, banyak anak banyak beban hidup di

kota.

2) Faktor Penghambat

- Tingginya biaya hidup, dengan tinggi biaya pendidikan, perumahan dan kesehatan, dan orang cenderung mempunyai anak sedikit;
- Perempuan pekerja, perempuan yang aktif secara ekonomi cenderung menunda atau membatasi jumlah anak.

3) Rencana Tindaklanjut

Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait data pembangunan berwawasan kependudukan

b. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*)

Unmetneed merupakan jumlah pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (Tidak KB) yang terdiri dari pasangan usia subur Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). Rumus presentase *Unmetneed* : Jumlah pasangan usia subur (PUS) dikurangi jumlah peserta KB aktif dikurangi PUS hamil dan Ingin Anak Segera (IAS) dibagi pasangan usia subur x100%.

Capaian Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) di Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 7,71% atau 98,31% , dari target 7,58%. Capaian ini dengan kategori sangat tinggi Capaian Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1) Faktor Pendorong:

- Peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral, terintegrasinya kegiatan BKR (Bina keluarga Remaja) dan PIK (Pusat Informasi Konseling) remaja, inya kegiatan BKR (Bina keluarga Remaja) dan PIK (Pusat Informasi Konseling) remaja;
- Peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral
- pengembangan life skill bagi remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga.

2) Faktor Penghambat:

- Masih kurangnya SDM pengelola program KKBPK dilapangan dalam memberikan advokasi dan KIE pada masyarakat dan remaja.
- Adanya PUS dengan kelompok usia produktif antara umur 19 th sampai 30 Tahun yang menginginkan anak kembali dari anak 1 ke anak ke 2.

3) Tindak lanjut :

- Penguatan Program Pencegahan Digital & Pergaulan Bebas;
- Memperluas cakupan BKR dan PIK-R hingga tingkat desa/kelurahan serta memperkuat integrasi data monitoring.

c. Median usia kawin pertama (MUKP)

Median Usia Kawin Pertama adalah usia di mana 50 persen perempuan (atau laki-laki) dalam kelompok umur tertentu telah menikah untuk pertama kalinya, dan 50 persen lainnya belum menikah. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan pola dan kecenderungan usia perkawinan pertama, yang berpengaruh terhadap angka kelahiran, kesehatan reproduksi, serta pembangunan kependudukan secara umum.

Perhitungan Median Usia Kawin Pertama ini dihitung oleh BPS, dimana pada tahun 2026 memakai capaian pada tahun 2025, Capaian Median usia kawin pertama di Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 22 atau 100%, dari target 20,01. Capaian ini dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian Median usia kawin pertama di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1) Faktor Pendorong:

- Peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral, terintegrasinya kegiatan BKR (Bina keluarga Remaja) dan PIK (Pusat Informasi Konseling) remaja, inya kegiatan BKR (Bina keluarga Remaja) dan PIK (Pusat Informasi Konseling) remaja;
- Peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral
- Pengembangan *life skill* bagi remaja dalam menyiapkan

kehidupan berkeluarga.

- 2) Faktor Penghambat: Pengaruh pergaulan dan media digital yang meningkatkan resiko usia kawin diusia muda karena resiko kehamilan yang tidak diinginkan.
- 3) Rencana Tindaklanjut : Up dating data sebagai perhitungan ASFR.

d. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*age spesific fertility rate*/ASFR 15-19 tahun)

ASFR (*Age Specifik Fertility Rates*) adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur tertentu. Sedangkan ASFR 15–19 Tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur 15–19 tahun. Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas dari wanita usia subur menurut kelompok umurnya. Untuk perhitungan ASFR di Kabupaten Temanggung yang bersumber di DPPPAPPKB dihitung berdasar hasil pendataan yang dilakukan 5 tahun sekali dan dari perkembangan laporan selama 1 tahun. Capaian Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*age spesific fertility rate*/ASFR 15-19 tahun di Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 4,01 atau 100%, dari target 9,22, capaian ini dengan kategori sangat tinggi. Capaian Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*age spesific fertility rate*/ASFR 15-19 tahun di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- 1) Faktor Pendorong : Peningkatan kesadaran keluarga berencana (KB)
- 2) Faktor penghambat: Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi
- 3) Rencana Tindaklanjut :
 - Penguatan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
 - Optimalisasi dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Program Pembinaan Keluarga Berencana ini untuk Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB), program ini dipengaruhi oleh 4 indikator yaitu:

a. Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang

PUS dengan MKJP adalah jumlah PUS yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (Implant, IUD, MOP dan MOW). Rumus: Jumlah peserta KB Metode kontrasepsi jangka panjang dibagi jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi. Capaian Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang di Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 48,20% atau 100 %, dari target 46,95%, capaian ini dengan kategori sangat tinggi. Capaian Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang tahun di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1) Faktor Pendorong :

- Tingginya animo masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi implan
- Meningkatnya kegiatan pelayanan KB MKJP Moment Strategis

2) Faktor penghambat

- Masih tingginya Rumor kegagalan IUD di masyarakat;
- Dukungan anggaran pencabutan Implan rendah berakibat peserta KB yang seharusnya dicabut dan ingin berKB lagi, menjadi PUS DO
- Masih rendahnya animo masyarakat dalam pelayanan KB MOW dan MOP
- Meningkatnya kemandirian menggunakan alat kontrasepsi suntik

3) Rencana Tindak lanjut :

- Mengintensifkan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) interpersonal serta konseling berkualitas oleh kader/PLKB untuk mematahkan mitos atau rumor kegagalan IUD.
- Mengedukasi masyarakat mengenai efektivitas, keamanan, dan manfaat jangka panjang dari metode kontrasepsi mantap (MOW dan MOP) guna meningkatkan animo calon akseptor.

b. Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern contraceptive* (mCPR)

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur yang secara berkelanjutan menggunakan alat kontrasepsi baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Non MKJP. Rumus: Jumlah peserta KB Aktif dibagi jumlah PUS di kali 100. Capaian Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern contraceptive* (mCPR) di Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 82,71 atau 100% , dari target 77,7 Capaian ini dengan kategori sangat tinggi Capaian Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern contraceptive* (mCPR) tahun di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- 1) Faktor Pendorong adalah :
 - Tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk berKB;
 - Tingginya KIE, Advokasi kepada masyarakat dan stake holder;
 - Mobiliias media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasepsi.
- 2) Faktor Penghambat adalah:
 - Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi modern
 - PUS muda yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan
- 3) Rencana Tindak lanjut : Pendampingan PUS Muda, Memberikan pembekalan khusus perencanaan keluarga dan pilihan alokon modern saat proses registrasi/konseling pra-nikah.

c. Persentase KB Pasca Persalinan

KB pasca persalinan adalah pelayanan kontrasepsi yang diberikan kepada ibu segera setelah melahirkan hingga 42 hari (6 minggu) pasca persalinan. KB Pasca Persalinan mencakup pemberian metode kontrasepsi jangka pendek maupun jangka panjang (MKJP), seperti IUD pasca plasenta, implan, suntikan, pil, maupun kondom, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ibu pasca melahirkan. Rumus persentase KB pasca persalinan adalah jumlah PUS yang menggunakan alat

kontrasepsi setelah melahirkan dibagi dengan jumlah PUS Yang baru melahirkan dikalikan 100%. Capaian Persentase KB Pasca Persalinan di Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 80,24% atau 100%, dari target 59,9%, capaian ini dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian Persentase KB Pasca Persalinan tahun di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- 1) Faktor pendorong : Ketersediaannya alat kontrsepsi dan koordinasi yang baik terkait kegiatan pelayanan kb pasca persalinan oleh tenaga kesehatan
- 2) Faktor Penghambat : Adanya mitos tentang efek samping penggunaan alokon pasca persalinan
- 3) Rencana Tindak Pengendalian: Inovasi berupa aplikasi SIMANTAPKON KB (Sistem Informasi Managemen Pencatatan, Pelaporan dan pemantauan Kontrasepsi Keluarga Berencana, Sehingga bisa mengetahui segmentasi sasaran dalam pelayanan KB.

d. Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri

Kampung KB Keluarga berkualitas mandiri adalah kampung KB yang telah mampu mengelola dan mengembangkan kegiatan program bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) serta program pembangunan lintas sektor secara mandiri berkelanjutan dan berkualitas. Rumus Presentase kampung keluarga berkualitas mandiri adalah: Jumlah Kampung KB kategori Mandiri dibagi Jumlah seluruh kampung KB dikalikan 100.

Capaian Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri di Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 80,24% atau 100%, dari target 59,9%, capaian ini dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian Persentase KB Pasca Persalinan di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor :

a. Faktor Penghambat

- Belum adanya Perbup Kampung KB;
- Kurangnya Sosialisasi pengembangan kampung KB pada lintas sektor OPD;
- Tidak adanya dana APBN untuk pembentukan

Kampung KB;

- Kurangnya koordinasi di lini lapangan, dari PKB, Desa, Pokja Kampung KB, linsek kec dan masyarakat;
- Belum semua pokja kampung KB mendapatkan pelatihan kampung KB;
- Belum semua desa kampung KB mau mengembangkan Kampung KB dari setara dusun menjadi setara desa;
- Kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang pengembangan kampung KB.

b. Faktor Pendorong

- Adanya potensi kader di kampung Kb yg bisa di berdayakan;
- Adanya dana desa yg bisa di anggarkan untuk pengembangan kampung KB;
- Adanya dukungan dari masyarakat;
- Adanya dukungan dari stakeholder, toma, toga;
- Adanya Tim Pengembangan kampung KB kabupaten.

c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan frekuensi advokasi dan KIE bagi lintas sektor atau OPD;
- Mengadakan Sosialisasi tentang Pengembangan kampung KB pada Pokja Kampung KB, linsek, masyarakat;
- Mengadakan pelatihan bagi Pokja Kampung KB;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan di Kampung KB;
- Mengadakan Monev kampung KB.

8. Program Pemberdayaan Keluarga dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pembinaan Keluarga Berencana ini untuk Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB), program ini dipengaruhi oleh 3 indikator yaitu

a. Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah program pemberdayaan keluarga yang memiliki anak usia 0–5 tahun melalui

pendidikan dan penyuluhan tentang pengasuhan, tumbuh kembang, kesehatan, dan gizi balita, agar orang tua mampu memberikan pengasuhan yang tepat, berkualitas, dan stimulasi perkembangan anak secara optimal. Rumus Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita : $\frac{\text{Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan BKB}}{\text{Jumlah total keluarga yang memiliki balita}} \times 100\%$. Capaian Persentase ka Keluarga yang mengikuti kegiatan Bina Keluarga di Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 40,28% atau 88,04%, dari target 45,75%, capaian ini dengan kategori tinggi. Capaian Persentase ka Keluarga yang mengikuti kegiatan Bina Keluarga tahun di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1) Faktor pendorong :

- Partisipasi kader BKB, dalam penyuluhan kepada sasaran BKB
- Ketersediannya alat permainan edukasi, terutama pada kelompok yang menjadi lokus stunting
- Kader BKB telah dilatih

2) Faktor Penghambat :

- Belum optimalnya integrasi layanan BKB dengan posyandu dan PAUD
- Rendahnya kehadiran orang tua dalam kegiatan BKB

3) Rencana Tindak Pengendalian: Koordinasi lintas sektoral kegiatan bisa terintegrasi

b. Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja

Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemampuan, keterlibatan, dan kualitas praktik pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki anak usia remaja (10–24 tahun). Indeks ini menilai sejauh mana keluarga memberikan Perhitungan Indeks Pengasuhan Remaja (IPR) yang digunakan BKKBN di Indonesia adalah dengan menggabungkan 9 indikator kunci yang mengukur aspek pengasuhan keluarga terhadap remaja, seperti legalitas diri, akses pendidikan, jaminan kesehatan, dan jaminan masa depan. Capaian Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja, yang dihitung

BKKBN tercapai 86,8 atau 99,31% dari target 87,4 dengan kategori tinggi, capaian Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja di Kabupaten Temanggung, dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- 1) Faktor pendorong : Ketersediaan Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) yang aktif di desa/kelurahan.
- 2) Faktor Penghambat : Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja yang tidak terkontrol, sehingga menyulitkan orang tua dalam pengasuhan.
- 3) Rencana Tindak Pengendalian: Meningkatkan cakupan dan kualitas kegiatan BKR di semua desa/kelurahan.

c. Indeks Lansia berdaya

Indeks Lansia Berdaya adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemandirian, kualitas hidup, serta peran aktif lanjut usia (lansia) dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Indeks ini menilai sejauh mana lansia mampu:

- Mengakses layanan kesehatan dan menjaga kebugaran
- Berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat, dan
- Memiliki kemandirian dalam aktivitas sehari-hari

Capaian Indeks Lansia Berdaya , yang dihitung BKKBN tercapai 75,9 atau 100% dari target 58 dengan kategori sangat tinggi, capaian Indeks Lansia Berdaya di kabupaten Temanggung, dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- 1) Faktor Pendorong:
 - Ketersediaan posyandu lansia yang aktif dan terjadwal;
 - Tingginya keterlibatan lansia dalam kegiatan masyarakat, seperti keagamaan, adat, atau kemasyarakatan.
- 2) Faktor Penghambat: Keterbatasan kader lansia serta kurangnya pelatihan untuk pembinaan kelompok lansia.
- 3) Rencana tindak lanjut: Mendorong pembentukan kelompok lansia berdaya di desa/kelurahan

C. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis, tujuan, atau hasil utama yang ingin dicapai oleh DPPPAPPKB. Adapun INDIKATOR Kinerja Kunci DPPPAPPKB yang tertuang dalam dokumen Renstra adalah sebagai berikut :

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Persentase ARG pada belanja langsung adalah proposi anggaran yang mengintegrasikan analisis gender (ARG) dalam program dan kegiatan terhadap total belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada waktu tahun tertentu.

Untuk memperoleh angka Persentase ARG pada belanja langsung APBD dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari persentase jumlah anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD dibandingkan dengan jumlah anggaran belanja langsung APBD secara keseluruhan dikalikan 100. Capaian Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD.Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 8,44 atau 87,04 % dari target 9,7, dengan kategori tinggi, Capaian Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Faktor Pendorongnya :
 - Telah dilaksankanya pembekalan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Anggaran Resposif Gender dalam proses perencanaan;
 - Telah disyaratkan sebagai dokumen yang harus *direview* oleh Inspektorat dalam penyusunan RKA.
- 2) Faktor Penghambatnya :
 - Perencana dan pengelola anggaran belum memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep gender dan bagaimana menerapkan dalam anggaran;
 - Implemantasi ARG sangat bergantung pada dukungan dan komitmen dari pimpinan Lembaga atau daerah, tanpa dukungan ini ARG , hanya menjadi formalitas;
 - Beberapa Pihak menganggap ARG hanya sebagai beban

administrasi tambahan, bukan bagian penting dari perencanaan yang berkualitas;

2. Rasio anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota

Rasio kasus kekerasan terhadap anak adalah angka yang menunjukkan Perbandingan antara jumlah kasus yang dialami anak dalam 1 tahun tertentu dengan jumlah total penduduk anak. Rumus Rasio kasus kekerasan terhadap anak adalah: Jumlah anak di wilayah tersebut dibagi

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dibagi jumlah anak dikalikan 100.000 penduduk anak. Capaian Rasio kasus kekerasan terhadap anak Capaian Rasio kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 1,36 atau 100%, dari target 8,48. Capaian ini dengan kategori sangat tinggi. Capaian Rasio kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Faktor Pendorong adalah :

- Adanya regulasi dan kebijakan nasional yang mengatur perlindungan terhadap anak;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak;
- Adanya layanan pengaduan kekerasan terhadap anak, lewat Aplikasi SIPESAN PERAK;
- Keterlibatan berbagai sektor hukum, pendidikan, kesehatan, sosial, dan agama dalam menangani kasus anak.

2) Faktor Penghambat adalah:

1. Kurangnya dan kesedaran masyarakat tentang hak hak anak;
2. Keterbatasan jumlah dan kemampuan pendamping dan petugas.

3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Kasus kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu,

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Rumus: Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah perempuan yang ada kali 100.000 (per 100.000 perempuan). Capaian Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) .Kabupaten Temanggung sampai Triwulan I Tahun 2026 tercapai 0,73 atau 100% dari target 5,15, Capaian Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor Pendorongnya adalah:

- Semakin meningkatnya pemahaman orang tua dan anak tentang perlindungan anak perempuan;
- Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.

2. Faktor Penghambatnya adalah : Kurangnya pemahaman masyarakat atas hak anak dan perlindungan anak.

4. TFR (*Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total)

TFR (*Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total), yaitu banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15–49 tahun selama periode tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15–49 tahun pada periode yang sama, capaian TFR (*Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total) Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 1,24 atau 100 % dari target 2,17, dengan kategori sangat tinggi. Capaian TFR (*Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total) di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1) Faktor Pendorong

- Penundaan usia perkawinan;
- Perubahan nilai budaya dari nilai tradisional menuju individualistik;
- Gaya hidup urban, banyak anak banyak beban hidup di kota.

2) Faktor Penghambat

- Tingginya biaya hidup, dengan tinggi biaya

pendidikan, perumahan dan kesehatan, dan orang cenderung mempunyai anak sedikit;

- Perempuan pekerja, perempuan yang aktif secara ekonomi cenderung menunda atau membatasi jumlah anak

5. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*)

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur yang secara berkelanjutan menggunakan alat kontrasepsi baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Non MKJP. Rumus: Jumlah peserta KB Aktif dibagi jumlah PUS di kali 100. Capaian Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern contraceptive* (mCPR) di Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 82,71% atau 100%, dari target 77,7% Capaian ini dengan kategori sangat tinggi Capaian Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern contraceptive* (mCPR) tahun di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1) Faktor Pendorong adalah :

- Tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk berKB;
- Tingginya KIE dan advokasi kepada masyarakat dan stakeholder;
- Mobilitas media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasepsi.

2) Faktor Penghambat adalah:

- Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi modern
- PUS muda yang menikah di usia dini belum terbekali dengan pengetahuan.

6. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*)

Unmetneed merupakan jumlah pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (Tidak KB) yang terdiri dari pasangan usia subur Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). Rumus presentase *unmetneed* : Jumlah pasangan usia subur (PUS) dikurangi jumlah peserta KB aktif dikurangi PUS hamil dan Ingin Anak Segera (IAS) dibagi pasangan usia subur dikali 100%.

Capaian Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) di Kabupaten Temanggung sampai triwulan I Tahun 2026 tercapai 7,71 atau 98,31%, dari target 7,58. Capaian ini dengan kategori sangat tinggi. Capaian Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1) Faktor Pendorong:

- Peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral, terintegrasinya kegiatan BKR (Bina keluarga Remaja) dan PIK (Pusat Informasi Konseling) remaja, inya kegiatan BKR (Bina keluarga Remaja) dan PIK (Pusat Informasi Konseling) remaja;
- Peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral;
- Pengembangan *life skill* bagi remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga.

2) Faktor Penghambat:

- Masih kurangnya SDM pengelola program KKBPK dilapangan dalam memberikan advokasi dan KIE pada masyarakat dan remaja;
- Adanya PUS dengan kelompok usia produktif antara umur 19 th sampai 30 Tahun yang menginginkan anak kembali dari anak 1 ke anak ke 2.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPPAPPKB

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DPPPAPPKB dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja DPPPAPPKB dari 30 indikator terdapat indikator yang belum mencapai target 100%, walaupun dengan capaian sangat tinggi, antara lain:

- a. Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah
- b. Indikator Nilai IKM Perangkat Daerah
- c. Indikator Indeks Ketimpangan Gender

- d. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender
 - e. Indikator Persentase ARG pada belanja langsung APBD
 - f. Indikator Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas
 - g. Indikator Kabupaten Layak Anak
 - h. Indikator Persentase terbentuknya DRPPA
 - i. Indikator Indeks Perlindungan Anak
 - j. Indikator Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak 10terpenuhi {unmetneed)
 - k. Indikator Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita
 - l. Indikator Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB, antara :
- a. Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, khususnya tenaga teknis dan penyuluh;
 - b. Belum optimalnya koordinasi, sinergi, dan komitmen lintas perangkat daerah serta pemangku kepentingan;
 - c. Kualitas dan integrasi data sektoral belum sepenuhnya akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan dan evaluasi;
 - d. Belum optimalnya dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala ;
 - e. Partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga masih perlu ditingkatkan;
 - f. Faktor sosial budaya yang masih memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program, terutama terkait kesetaraan gender, perlindungan anak, dan penggunaan kontrasepsi.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun pencapaian program nasional antara lain:
- a. Terhambatnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkualitas, yang ditunjukkan dengan belum tercapainya target Nilai AKIP dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kondisi ini memengaruhi upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik sebagaimana menjadi bagian dari visi dan misi Kepala Daerah.

- b. Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, yang tercermin dari belum tercapainya target Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), dan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG). Dampaknya adalah masih terdapat kesenjangan kesempatan dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.
 - c. Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, yang ditunjukkan dengan belum tercapainya target Kabupaten Layak Anak (KLA), Persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas, Persentase Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), serta Indeks Perlindungan Anak. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya upaya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah bagi tumbuh kembang anak.
 - d. Belum optimalnya pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga, yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka *unmetneed*. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kehamilan yang tidak direncanakan, menghambat pencapaian keluarga berkualitas, serta memengaruhi keberhasilan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPPPAPPKB, antara lain :
- a. Tantangan :
Pencapaian indikator kinerja DPPPAPPKB masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya kualitas dan integrasi data, koordinasi lintas sektor yang belum efektif, keterbatasan SDM dan anggaran, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), serta masih adanya permasalahan kependudukan dan keluarga seperti perkawinan anak, kehamilan remaja, dan unmet need pelayanan KB. Selain itu, perubahan sosial dan perkembangan teknologi turut memengaruhi ketahanan keluarga dan perlindungan.
 - b. Peluang
Di sisi lain, terdapat peluang yang besar untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja melalui dukungan kebijakan

nasional, penguatan Program Bangga Kencana, percepatan penurunan stunting, implementasi PUG dan Anggaran Responsif Gender (ARG), pemanfaatan sistem informasi digital, serta meningkatnya kolaborasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pelayanan, meningkatkan efektivitas program, serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

5. Rekomendasi dan catatan strategis yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan untuk tahun yang akan datang . antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data;
- b. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan UPTD;
- d. Mengoptimalkan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG);
- e. Memperkuat Program Bangga Kencana dan pembangunan keluarga, melalui peningkatan akses pelayanan KB, penguatan Kampung KB, pembinaan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan UPPKA), serta edukasi kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan;
- f. Menyusun prioritas program sesuai kemampuan keuangan daerah;
- g. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja, melalui penetapan indikator yang terukur, evaluasi berkala, serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan program dan penganggaran pada tahun berikutnya.

2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD

Kamus usulan kegiatan merupakan kelompok usulan permasalahan yang disusun dalam SIPD yang sudah disesuaikan dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah (Program prioritas yang tercantum dalam

dokumen RPJMD Tahun 2025-2029). Tujuan penyusunan Kamus kegiatan adalah untuk memastikan agar usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Verifikasi yang dilakukan mulai dari User sekretariat DPRD sampai dengan user Perangkat daerah adalah untuk memastikan kembali bahwa usulan permasalahan/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD telah sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Secara rinci rumusan Kamus kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD sebagai berikut:

Tabel 2.6
Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPD TUJUAN	PROGRAM
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	NIHIL		

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2026

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal DPPPAPPKB, yaitu sejumlah 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota
 - c. Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota
2. Terdapat penambahan pagu anggaran sesuai hasil usulan dari Forum Khusus Anak dan Forum Generasi Berencana, kedalam sub kegiatan yaitu :

- a. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota, Untuk mendukung kegiatan Hari Anak Nasional
- b. Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga, dalam rangka mendukung pemilihan Duta Genre dan *goes to school*

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN RENJA DPPPAPKB TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(=/-)
No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif		No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	2	3		1	2	3	4
1	URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	4.375.963.242		1	URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	4.324.563.242	(51.400.000)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.375.963.242		A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.324.563.242	(51.400.000)
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.530.792.532		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.530.792.532	-
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.530.792.532		2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.530.792.532	-
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.949.520		III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.639.520	-6.310.000
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000		3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	-
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	-
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.040.000	(1.960.000)
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000		6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.499.000	(1.501.000)
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.949.520		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.100.520	(2.849.000)
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.321.190		IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.631.190	11.310.000
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000		8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	-
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.500.000		9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.500.000	-
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000		10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	-

RANCANGAN RENJA DPPPAPKB TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(=/-)
No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif		No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	2	3		1	2	3	4
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	673.821.190		11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	685.131.190	11.310.000
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.900.000		V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.400.000	-6.500.000
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000		12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	-
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.900.000		13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.900.000	-
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000		14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.500.000	(1.500.000)
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000		15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	(5.000.000)
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	97.612.751		II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	124.162.751	26.550.000
B.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	25.000.000		B.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	5.000.000	(20.000.000)
VI	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000		VI	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	5.000.000	-
16	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	5.000.000		16	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	5.000.000	-
VII	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000		VII	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	(20.000.000)
18	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota /Kota	20.000.000		18	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota /Kota	-	(20.000.000)
C.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	5.000.000		C.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	20.000.000	15.000.000
VIII	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten	0		VIII	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten	5.000.000	5.000.000

RANCANGAN RENJA DPPPAPKB TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(=/-)
No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif		No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	2	3		1	2	3	4
19	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	0		19	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	5.000.000	5.000.000
IX	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000		IX	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	10.000.000
20	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000		20	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	15.000.000	10.000.000
D	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20.000.000		D	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	40.000.000	20.000.000
X	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000		X	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	20.000.000
21	Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000		21	Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	(20.000.000)
22	Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0		22	Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000
23	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			23	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000
E	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	42.612.751		E	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	32.000.000	-10.612.751
XI	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0		XI	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	27.000.000	27.000.000
24	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	0		24	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	27.000.000	27.000.000
XII	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42.612.751		XII	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	(37.612.751)
25	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42.612.751		25	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	(42.612.751)

RANCANGAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(=/-)
No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif		No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	2	3		1	2	3	4
26	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	0		26	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	5.000.000	5.000.000
F	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	5.000.000		F	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	27.162.751	22.162.751
XIII	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000		XIII	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.162.751	22.162.751
27	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000		27	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	27.162.751	22.162.751
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.850.227.825		III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.911.127.825	60.900.000
G	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	264.000.000		G	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	264.000.000	-
XIV	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	15.000.000		XIV	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	15.000.000	-
28	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	15.000.000		28	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	15.000.000	-
XV	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	249.000.000		XV	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	249.000.000	-
27	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	173.400.000		27	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	173.400.000	-
28	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	75.600.000		28	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	75.600.000	-
H	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.354.821.000		H	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.354.821.000	-
XVI	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	802.600.000		XVI	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	802.600.000	-
29	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	747.600.000		29	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	747.600.000	-
30	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	15.000.000		30	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	15.000.000	-

RANCANGAN RENJA DPPAPPKB TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(=/-)
No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	2	3	1	2	3	4
31	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	40.000.000	31	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	40.000.000	-
XVII	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	46.784.000	XVII	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	46.784.000	-
32	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	46.784.000	32	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	46.784.000	-
XVIII	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.505.437.000	XVIII	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.505.437.000	-
33	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.700.000	33	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.700.000	-
34	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.448.737.000	34	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.448.737.000	-
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.231.406.825	I	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.292.306.825	60.900.000
XVIII	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	169.966.000	XVIII	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	169.966.000	-
35	Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	169.966.000	35	Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	169.966.000	-
XIX	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.061.440.825	XIX	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.122.340.825	60.900.000
36	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.278.000.000	36	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.278.900.000	900.000
37	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.740.500.000	37	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.740.500.000	-
38	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	42.940.825	38	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	102.940.825	60.000.000

RANCANGAN RENJA DPPAPPKB TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(=/-)
No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif		No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	2	3		1	2	3	4
	JUMLAH	11.323.803.818			JUMLAH	11.411.253.818	87.450.000

Sumber : DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

Tabel 2.8
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten Temanggung

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemenuhan Hak Anak /Peringatan hari anak Nasional	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya peringatan Hari Anak Nasional	1 paket	Usulan pagu 27.000.000
2	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)/Pemilihan Duta Genre	Kabupaten Temanggung	Terpilihnya <i>role model</i> /konselor sebaya dikabupaten Temanggung, dan wakil ditingkat Propinsi	1 paket	Usulan pagu 27.000.000

Sumber : DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2026

2.7. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi perangkat daerah dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di DPPPAPPKB ada 2 inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9
Daftar Inovasi Perangkat Daerah

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Penguatan Kapasitas dan Monitoring Analisis Responsif Gender Untuk Meningkatkan Penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya Kabupaten Temanggung	Perangkat Daerah se- Kabupaten Temanggung	APBD	Peningkatan kapasitas <i>Focal Point</i> PUG dan monitoring ARG untuk meningkatkan Nilai PPE	Meningkatnya kapasitas aparatur perangkat daerah dalam melakukan analisis responsif gender	meningkatnya nilai penganugerahan Parahita Ekapraya	2025

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
2	Pemanfaatan Instagram DPPAPPKB Sebagai Media Informasi terkait Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Temanggung	DPPPAPPKB, Masyarakat	APBD	Poses produksi KIE pencegahan kekerasan perempuan dan anak	Penyebarluasan informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	2025

Sumber : DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2026

2.8. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPPAPPKB ada 9 penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penyuluh KB Teladan Tingkat Jawa Tengah Juara i	Perwakilan BKKBN Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah	DPPPAPPKB
2	Pelayanan KB dalam rangka Hari Muslimat Juara I Tingkat Provinsi	Perwakilan BKKBN Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah	DPPPAPPKB
3	Juara IMP Teladan Juara III	Perwakilan BKKBN Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah	DPPPAPPKB
4	Terbaik II Regional Jawa Bali Kategori Capaian KB MKJP Tertinggi terhadap Total Pelayanan KB pada Kegiatan Pelayanan KB Serentak di Pasar Tradisional	Kemendukbangga /Kepala BKKBN	Provinsi Jawa Tengah	DPPPAPPKB
6	Komitmen dan dukungan dalam Gerakan Serentak Penertiban 1000 Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Kelompok UPPKA	Kemendukbangga /Kepala BKKBN	Provinsi Jawa Tengah	DPPPAPPKB
7	Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung Tahun 2025	Statistik Kabupaten Temsnggung	Tingkat Kabupaten Temanggung	DPPPAPPKB
8	Juara 1 Jawa Tengah Apresiasi pengelolaan DAK Sub Bidang KB	Kemendukbangga /Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah	DPPPAPPKB
9	Juara II Nasional Apresiasi pengelolaan DAK Sub Bidang KB	Kemendukbangga /Kepala BKKBN	Nasional	DPPPAPPKB

Sumber : DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2026

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPPPAPPKB lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung.

1. Arah Kebijakan RKP 2027

Tema RKP 2027 “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung mendukung Prioritas Nasional 4 dengan fokus pembangunan pada Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, dan Inovasi.

Program Kerja Prioritas Nasional terdiri dari 8 klaster dengan total 60 program. Klaster yang terkait DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung yaitu klaster Kesejahteraan, Pendidikan dan klaster Kesehatan.

2. Kebijakan Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's, Pengarusutamaan Tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Pengarusutamaan Gender

DPPPAPPKB dalam melaksanakan urusan pemerintahan urusan Pemberdayaan Perempuan dalam Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's mendukung SDG's tujuan 5 yaitu Kesetaraan Gender. Kesetaraan dan pemberdayaan gender juga menjadi target krusial dalam SDGs global. Penekanan pada poin ini tidak hanya mencakup penghapusan diskriminasi gender, tetapi juga penghapusan kekerasan berbasis gender, memastikan akses ke pendidikan dan pekerjaan yang layak, serta khususnya mendorong partisipasi penuh dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial yang turut melibatkan perempuan dan anak perempuan dalam segala bidang.

Sedangkan, untuk urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's mendukung tujuan 1 dan tujuan 3 yaitu:

Tujuan 1 SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun atau *end poverty in all its forms everywhere*. Tujuan ini menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan yang melatari

berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi dan lain-lain.

Tujuan 3 SDGs adalah Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Fokus utama tujuan ini adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan secara keseluruhan. Upaya itu, mulai dari penguatan sistem kesehatan, penurunan angka kematian, dan pengendalian penyebaran penyakit menular, serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan terjangkau.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPPPAPPKB

Tujuan DPPPAPPKB yang dirumuskan dalam Renstra DPPPAPPKB 2025-2029 adalah “Meningkatkan Kualitas Hidup, Perempuan, Anak, serta Keluarga” dengan sasaran yang akan dicapai adalah

1. Meningkatnya kesetaraan Gender
2. Meningkatnya perlindungan perempuan
3. Meningkatnya keluarga berkualitas

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB], maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja DPPPAPPKB
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DPPPAPPKB Kab. Temanggung pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2027

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
Meningkatkan Kualitas Hidup, Perempuan, Anak, serta Keluarga			Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,191	0,172
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	angka	64,79	66,63
	Meningkatnya kesetaraan Gender		Indeks Pemberdayaan Gender	%	74,5	74,8
		Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	10	10,5
			Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,4	2,5
	Meningkatnya perlindungan perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	%	100	100
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	angka	4,49	4,17
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	%	84,61	96,15
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	kategori	Nindya	Nindya
			Prosentase terbentuknya DRPPA	%	64,7	85,47
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pernikahan usia anak	%	0,094	0,059
			Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani	%	100	100
			Rasio kasus kekerasan terhadap anak	angka	8,03	6,69
	Meningkatnya keluarga berkualitas		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,77	0,74
			TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)	angka	2,16	2,14

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
		Program Pengendalian Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	58,9	59,1
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	%	7,57	7,54
			Median usia kawin pertama (MUKP)	angka	20,2	20,5
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>age spesific fertility rate/ASFR 15- 19 Tahun</i>)	angka	9,22	8,7
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	47,2	47,95
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern contraceptive (mCPR)</i>	%	78,25	80
			Persentase KB pasca persalinan	%	62,9	68,1
			Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	%	16,6	18,68
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	%	45,95	46,03
			Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	angka	87,5	87,8
			Indeks lansia berdaya	angka	58,1	58,3

Sumber : Renstra DPPAPPKB Kab. Temanggung Tahun 2025-2029

Kebijakan dan strategi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra DPPPAPPKB Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran DPPPAPPKB Tahun 2025-2029.

3.3. Program dan Kegiatan DPPPAPPKB

Dalam Renja Tahun Anggaran 2027 DPPPAPPKB mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 11.411.253.818 yang terdiri dari 9 program yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak, Program Perlindungan Khusus Anak, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera. Sedangkan Jumlah Kegiatan sebanyak 19 kegiatan yaitu:
Adapun Rencana program dan Kegiatan DPPPAPPKB tahun 2027, pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2027

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						11.411.253.818,00								11.421.183.242,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.411.253.818,00								11.421.183.242,00	
	2.08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						4.500.125.993,00								4.547.963.242,00	
1.	2.08.01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA						4.375.963.242,00								4.377.963.242,00	
							Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	-		-	100 %	837.670.710,00							-	827.170.710,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB			
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L		PROVI NSI				DAERA H	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
							Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	-		-	undefined undefined	1.500.000,00							-	2.000.000,00		
							-	-		-	-	3.530.792.532,00							-	3.530.792.532,00		
	2.08.01.2.01						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.500.000,00						Perangkat Daeah		2.000.000,00		
							-					1.500.000,00						Perangkat Daeah		2.000.000,00		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000,00							-	2.000.000,00		
	2.08.01.2.01.0001						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.500.000,00				-				2.000.000,00		
							Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	14 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraa		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan		-	2.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L (12)		PROVI NSI (13)				DAERA H (14)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
														n gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			kualitas layanan pendidikan dan kesehatan				
	2.08.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.530.792.532,00						-		3.530.792.532,00	
						-						3.530.792.532,00						-		3.530.792.532,00	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.530.792.532,00							-	3.530.792.532,00	
	2.08.01.2.02.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.530.792.532,00				-				3.530.792.532,00	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	27 Orang/bulan	3.530.792.532,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan		-	3.530.792.532,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
																	akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an				
	2.08.01.2.0 6					Administrasi Umum Perangkat Daerah						52.639.520,00						Perangkat Daeah		58.949.520,00	
						-						52.639.520,00						Perangkat Daeah		58.949.520,00	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	-	10.499.000,00							-	12.000.000,00	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	-	25.100.520,00							-	27.949.520,00	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	-	10.000.000,00							-	10.000.000,00	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	-	5.040.000,00							-	7.000.000,00	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	-	2.000.000,00							-	2.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.01.2.0 6.0001					Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Pe nerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00				-				2.000.000,00	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	2.000.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokas i Umu m (DAU)	4.Memper kuat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehata n, prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilita s.		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an		-	2.000.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.0 6.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00				-				10.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L		PROVI NSI				DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	10.000.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokas i Umu m (DAU)	4. Memper kuat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehata n, prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilita s.		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an		-	10.000.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.0 6.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.040.000,00				-				7.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.040.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokas i Umu m (DAU)	4. Memper kuat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehata n, prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilita s.		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an		-	7.000.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.0 6.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.499.000,00				-				12.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	10.499.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokas i Umu m (DAU)	4.Memper kuat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehata n, prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilita s.		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an		-	12.000.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.0 6.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.100.520,00				-				27.949.520,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	25.100.520,00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umu m (DAU)	4. Memper kuat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehata n, prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilita s.		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an		-	27.949.520,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						729.631.190,00						Perangkat Dacah		718.321.190,00	
						-						729.631.190,00						Perangkat Dacah		718.321.190,00	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	-		-	-	32.500.000,00							-	32.500.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF			
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
							Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	685.131.190,00							-	673.821.190,00		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.000.000,00							-	6.000.000,00		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	6.000.000,00							-	6.000.000,00		
	2.08.01.2.0 8.0001						Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6.000.000,00				-				6.000.000,00		
							Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokas i Umu m (DAU)	4.Memper kuat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehata n, prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n,		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an		-	6.000.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L (12)		PROVI NSI (13)				DAERA H (14)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
														pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilita s.							
	2.08.01.2.0 8.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						32.500.000,00			-					32.500.000,00	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	32.500.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokas i Umu m (DAU)	4.Memper kuat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehata n, prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda (generasi		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an		-	32.500.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L (12)	PROVI NSI (13)					DAERA H (14)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
															milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
	2.08.01.2.08.0003					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.000.000,00				-				6.000.000,00	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	6 Laporan	6.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
														milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
	2.08.01.2.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						685.131.190,00			-					673.821.190,00	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	685.131.190,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	673.821.190,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L (12)	PROVI NSI (13)					DAERA H (14)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
															dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
	2.08.01.2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						61.400.000,00						Perangkat Daeah		67.900.000,00	
						-						61.400.000,00						Perangkat Daeah		67.900.000,00	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	-	10.500.000,00							-	12.000.000,00	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	-	35.900.000,00							-	35.900.000,00	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-		-	-	-	15.000.000,00							-	15.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF			
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
							yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	-		-	-	0,00							-	5.000.000,00		
	2.08.01.2.0 9.0001						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					15.000.000,00			-					15.000.000,00		
							Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokas i Umu m (DAU)	4.Memper kuat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehata n, prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan		-	15.000.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L		PROVI NSI				DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
														perempua n, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilita s.		kesehat an					
	2.08.01.2.0 9.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						35.900.000,00			-				35.900.000,00		
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	75 Unit	35.900.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokas i Umu m (DAU)	4. Memper kuat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehata n, prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi		-	35.900.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L (12)		PROVI NSI (13)				DAERA H (14)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
														n peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			kan dan kesehatan				
	2.08.01.2.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.500.000,00				-			12.000.000,00		
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	10.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	12.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L (12)		PROVI NSI (13)				DAERA H (14)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
															(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
	2.08.01.2.09.0011					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00				-				5.000.000,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan		-	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L (12)		PROVI NSI (13)				DAERA H (14)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
														n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilita s.		kesehat an					
2.	2.08.02					PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						5.000.000,00								10.000.000,00	
							Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-		-	10 %	5.000.000,00							-	10.000.000,00	
							Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	-		-	2,4 %	5.000.000,00							-	10.000.000,00	
	2.08.02.2.0 1					Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						5.000.000,00					Perangkat Daeah			10.000.000,00	
						-						5.000.000,00					Perangkat Daeah			10.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L		PROVI NSI				DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraa n PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	5.000.000,00							-	10.000.000,00		
	2.08.02.2.0 1.0015					Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota					5.000.000,00				-				10.000.000,00		
						Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraa n PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	46 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokas i Umum (DAU)	4.Memper kuat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehata n, prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempuan		Terwuju dnya peningkatan kesejah teraan masyarakat melalui pember dayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan		-	10.000.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
													n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilita s.		kesehat an						
3.	2.08.03					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						20.000.000,00							25.000.000,00		
							Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	-		-	100 %	20.000.000,00							-	25.000.000,00	
							Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-		-	4,9 %	20.000.000,00							-	25.000.000,00	
	2.08.03.2.0 1					Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota						5.000.000,00						masyarakat		10.000.000,00	
						-						5.000.000,00						masyarakat		10.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-			-	-	5.000.000,00							-	10.000.000,00	
	2.08.03.2.0 1.0009					Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00				-				10.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L		PROVI NSI				DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	2 Kegiatan	5.000.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.02					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						15.000.000,00					masyarakat		15.000.000,00		

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L		PROVI NSI				DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						-						15.000.000,00					masyarakat		15.000.000,00		
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00		
	2.08.03.2.0 2.0010					Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						15.000.000,00			-				15.000.000,00		
						Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	15.000.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokas i Umum (DAU)	4.Memper kuat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehata n, prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an		-	15.000.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L (12)		PROVI NSI (13)				DAERA H (14)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
														(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
4.	2.08.04					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						40.000.000,00								40.000.000,00	
							Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	-		-	84,61 %	20.000.000,00							-	20.000.000,00	
	2.08.04.2.02					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00					terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kulaitas keluarga			40.000.000,00	
						-						40.000.000,00					terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan			40.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
																		kulaitas keluarga			
							Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	20.000.000,00							-	20.000.000,00	
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	-		-	-	20.000.000,00							-	20.000.000,00	
	2.08.04.2.0 2.0005						pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					20.000.000,00				-				20.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L		PROVI NSI				DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	-		-	46 Lembaga	20.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.04.2.02.0006					penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						20.000.000,00				-				20.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	25 Lembaga	20.000.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memper kuat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehata n, prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilita s.		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an		-	20.000.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
5.	2.08.06					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						32.000.000,00								65.000.000,00	
							Kabupaten Layak Anak	-		-	MADYA KATEGORI	27.000.000,00							-	40.000.000,00	
							Prosentase terbentuknya DRPPA	-		-	43,94 %	27.000.000,00							-	40.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB			
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L (12)		PROVI NSI (13)				DAERA H (14)	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
						-	-	-	-	-	-	5.000.000,00						-	-	25.000.000,00		
	2.08.06.2.0 1					Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						27.000.000,00					Lembaga			40.000.000,00		
						-						27.000.000,00						Lembaga			40.000.000,00	
							Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	-		-	-	27.000.000,00							-		40.000.000,00	
	2.08.06.2.0 1.0010					Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						27.000.000,00				-					40.000.000,00	
						Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	-		-	2 Laporan	27.000.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokas i Umu m (DAU)	4.Memper kuat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehata n,		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk		-		40.000.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L (12)	PROVI NSI (13)					DAERA H (14)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
															prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilita s.		atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an				
	2.08.06.2.0 2					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						5.000.000,00					-		25.000.000,00		
						-						5.000.000,00						-		25.000.000,00	
						Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	-	-	5.000.000,00						-		25.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L		PROVI NSI				DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.06.2.0 2.0012					Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00				-				25.000.000,00	
						Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	30 Orang	5.000.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokas i Umu m (DAU)	-		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an		-	25.000.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
6.	2.08.07					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						27.162.751,00								30.000.000,00	
							Indeks Perlindungan Anak (IPA)	-		-	64,7 %	27.162.751,00							-	30.000.000,00	
							Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi	-		-	100 %	27.162.751,00							-	30.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							terkait kabupaten														
							Persentase pernikahan usia anak	-		-	0,084 %	27.162.751,00							-	30.000.000,00	
							Rasio kasus kekerasan terhadap anak	-		-	8,03 %	27.162.751,00							-	30.000.000,00	
	2.08.07.2.0 2						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					27.162.751,00						Anak dan Masyarakat		30.000.000,00	
							-					27.162.751,00						Anak dan Masyarakat		30.000.000,00	
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	27.162.751,00							-	30.000.000,00	
	2.08.07.2.0 2.0016						Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota					27.162.751,00				-				30.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	20 Orang	27.162.751,00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						6.911.127.825,00								6.873.220.000,00	
7.	2.14.02					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						264.000.000,00								264.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L		PROVI NSI				DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)	-		-	9,09 %	264.000.000,00							-	264.000.000,00	
	2.14.02.2.01						Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					15.000.000,00						-		15.000.000,00	
							-					15.000.000,00						-		15.000.000,00	
							Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	15.000.000,00							-	15.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0042						Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas					15.000.000,00				-				15.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	2 Kelompok	15.000.000,00	Kab. Temang gung	DAK Non Fisik-BOKB -KB	4. Memper kuat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehata n, prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanda ng disabilita s.		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an		-	15.000.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota						249.000.000,00						-		249.000.000,00	
						-						249.000.000,00						-		249.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-		-	-	75.600.000,00							-	75.600.000,00		
						Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	-	173.400.000,00							-	173.400.000,00		
	2.14.02.2.0 2.0013					Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					75.600.000,00				-				75.600.000,00		
						Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-		-	12 Dokume n	75.600.000,00	Kab. Temang gung	DAK Non Fisik- BOKB -KB	-		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an		-	75.600.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L		PROVI NSI				DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.02.2.0 2.0030					Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						173.400.000,00				-				173.400.000,00	
						Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	20 Laporan	173.400.000,00	Kab. Temang gung	DAK Non Fisik- BOKB -KB	-		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an		-	173.400.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
8.	2.14.03					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						2.354.821.000,00								2.319.821.000,00	
							Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	-		-	16,60 %	802.600.000,00							-	767.600.000,00	
							Persentase KB pasca persalinan	-		-	62,90 %	802.600.000,00							-	767.600.000,00	
							Persentase keberhasilan pemakaian metode	-		-	47,2 %	802.600.000,00							-	767.600.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L (12)	PROVI NSI (13)					DAERA H (14)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							kontrasepsi jangka panjang														
							Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	-		-	78,25 %	802.600.000,00							-	767.600.000,00	
							-	-		-	-	1.552.221.000,00							-	1.552.221.000,00	
	2.14.03.2.0 1						Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					802.600.000,00					Masyarakat, Peserta KB Aktif, Pasangan Usia Subur		767.600.000,00		
							-					802.600.000,00					Masyarakat, Peserta KB Aktif, Pasangan Usia Subur		767.600.000,00		
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	-		-	-	15.000.000,00						-	20.000.000,00		

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		-	-	747.600.000,00							-	747.600.000,00		
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-		-	-	40.000.000,00							-	0,00		
	2.14.03.2.0 1.0010					Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana					747.600.000,00				-				747.600.000,00		
						Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		-	20 Laporan	747.600.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokas i Umum (DAU) DAK Non Fisik- BOKB -KB	-		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonom		-	747.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L		PROVI NSI				DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
																i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an				Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.0 1.0013					Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal					15.000.000,00				-				20.000.000,00		
						Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	-		-	5 Dokume n	15.000.000,00	Kab. Temang gung	Dana Alokas i Umu m (DAU)	4.Memper kuat pembang unan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika n, kesehata n, prestasi olahraga, kesetaraa n gender, serta penguata n peran perempua n, pemuda (generasi		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an		-	20.000.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L (12)	PROVI NSI (13)					DAERA H (14)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
														milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
	2.14.03.2.01.0014					Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						40.000.000,00			-					0,00	
						Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-		-	25 Organisasi	40.000.000,00	Kab. Temanggung	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.03.2.0 2					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						46.784.000,00						-		46.784.000,00	
						-						46.784.000,00						-		46.784.000,00	
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		-		-	-	46.784.000,00							-	46.784.000,00	
	2.14.03.2.0 2.0004					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						46.784.000,00				-				46.784.000,00	
						Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-		-	289 Orang	46.784.000,00	Kab. Temang gung	DAK Non Fisik- BOKB -KB	-		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an		-	46.784.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.0 3					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat						1.505.437.000,00						-		1.505.437.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF			
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
						dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota																
						-						1.505.437.000,00						-		1.505.437.000,00		
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	-		-	-	56.700.000,00						-		56.700.000,00		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-		-	-	1.448.737.000,00							-		1.448.737.000,00	
	2.14.03.2.0 3.0003					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						1.448.737.000,00				-				1.448.737.000,00		

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L		PROVI NSI				DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-		-	4294 Orang	1.448.737.000,00	Kab. Temang gung	DAK Non Fisik-BOKB -KB	-		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an		-	1.448.737.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.0 3.0029					Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						56.700.000,00				-				56.700.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L		PROVI NSI				DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	12 Laporan	56.700.000,00	Kab. Temang gung	DAK Non Fisik-BOKB -KB	-		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	56.700.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	2.14.04					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						4.292.306.825,00								4.289.399.000,00	
							indek lansia berdaya	-		-	58,1 %	4.122.340.825,00							-	4.119.400.000,00	
							Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	-		-	87,5 undefined	169.966.000,00							-	169.999.000,00	
							ndeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	-		-	87,5 angka	4.122.340.825,00							-	4.119.400.000,00	
							Persentase keluarga yang mengikuti	-		-	45,95 %	4.122.340.825,00							-	4.119.400.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							kegiatan bina keluarga balita														
							Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	-		-	45,95 %	169.966.000,00							-	169.999.000,00	
	2.14.04.2.01					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						169.966.000,00						-		169.999.000,00	
						-						169.966.000,00						-		169.999.000,00	
							Jumlah Kelompok Kegiatan/Poktan atau setara Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapatkan biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan)	-		-	-	169.966.000,00							-	169.999.000,00	
	2.14.04.2.01.0039					Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan/Poktan						169.966.000,00				-				169.999.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIONA L (12)		PROVI NSI (13)				DAERA H (14)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						(BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))															
						Tersedianya biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan) bagi BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan/Poktan atau setara Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapatkan biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan)	-		-	500 Kelompok	169.966.000,00	Kab. Temanggung	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	169.999.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.02					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan						4.122.340.825,00						masyarakat		4.119.400.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Kesejahteraan Keluarga															
						-						4.122.340.825,00						masyarakat		4.119.400.000,00	
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calo n PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-		-	-	1.278.900.000,00							-	1.278.900.000,00	
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	-	2.740.500.000,00							-	2.740.500.000,00	
							Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakata n dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	-		-	-	102.940.825,00							-	100.000.000,00	
	2.14.04.2.0 2.0005					Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko						1.278.900.000,00				-				1.278.900.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)															
						Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calo n PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-		-	10 laporan	1.278.900.000,00	Kab. Temang gung	DAK Non Fisik- BOKB -KB	-		Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat melalui pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an		-	1.278.900.000,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.0 2.0007					Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga						102.940.825,00				-				100.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	-		-	2 Laporan	102.940.825,00	Kab. Temang gung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.02.0009					Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						2.740.500.000,00				-				2.740.500.000,00	
						Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	27.828 Keluarga	2.740.500.000,00	Kab. Temang gung	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui		-	2.740.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET AKHIR RENST RA	REALIS ASI 2025	PRAKIR AAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB			
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF				
															NASIONA L	PROVI NSI					DAERA H		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		(18)
																		pember dayaan ekonom i dan peningk atan akses dan kualitas layanan pendidi kan dan kesehat an					Penduduk dan Keluarga Berencana
	J U M L A H											11.411.253.818,00								11.421.183.242,00			

Sumber : SIPD RI Kemendagri, 2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2027 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2027 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DPPPAPPKB Tahun 2027 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan DPPAPPKB Kab. Temanggung Tahun 2027

RANCANGAN RENJA DPPAPPKB TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			
No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan	Pagu Indikatif	No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif (=/-)
1	2	3	1	2	3	4
1	URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	4.375.963.242	1	URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	4.324.563.242	51.400.000
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.375.963.242	A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.324.563.242	51.400.000
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.530.792.532	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.530.792.532	-
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.530.792.532	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.530.792.532	-
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.949.520	III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.639.520	-6.310.000
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	-
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	-
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.040.000	1.960.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.499.000	1.501.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.949.520	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.100.520	2.849.000
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.321.190	IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.631.190	11.310.000
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	-
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.500.000	9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.500.000	-
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	-
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	673.821.190	11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	685.131.190	11.310.000
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.900.000	V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.400.000	-6.500.000
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	-
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.900.000	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.900.000	-
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000	14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.500.000	1.500.000
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	5.000.000

RANCANGAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			
No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan	Pagu Indikatif	No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif (=/-)
1	2	3	1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	97.612.751		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	124.162.751	26.550.000
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	25.000.000		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	5.000.000	20.000.000
VI	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	VI	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	5.000.000	-
16	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	5.000.000	16	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	5.000.000	-
VII	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	VII	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	20.000.000
18	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota /Kota	20.000.000	18	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota /Kota	-	20.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	5.000.000		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	20.000.000	15.000.000
VIII	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten	0	VIII	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten	5.000.000	5.000.000
19	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	0	19	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	5.000.000	5.000.000
IX	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	IX	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	10.000.000
20	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000	20	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	15.000.000	10.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20.000.000		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	40.000.000	20.000.000
X	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	X	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	20.000.000
21	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	21	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	20.000.000
22	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	22	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000

RANCANGAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			
No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan	Pagu Indikatif	No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif (=/-)
1	2	3	1	2	3	4
23	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	23	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	42.612.751		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	32.000.000	-10.612.751
XI	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0	XI	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	27.000.000	27.000.000
24	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	0	24	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	27.000.000	27.000.000
XII	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42.612.751	XII	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	37.612.751
25	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42.612.751	25	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	42.612.751
26	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	0	26	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	5.000.000	5.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	5.000.000		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	27.162.751	22.162.751
XIII	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	XIII	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.162.751	22.162.751
27	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000	27	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	27.162.751	22.162.751
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.850.227.825		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.911.127.825	60.900.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	264.000.000		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	264.000.000	-
XIV	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	15.000.000	XIV	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	15.000.000	-
28	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	15.000.000	28	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	15.000.000	-
XV	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	249.000.000	XV	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	249.000.000	-
27	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	173.400.000	27	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	173.400.000	-

RANCANGAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			
No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan	Pagu Indikatif	No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif (=/-)
1	2	3	1	2	3	4
28	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	75.600.000	28	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	75.600.000	-
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.354.821.000		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.354.821.000	-
XVI	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	802.600.000	XVI	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	802.600.000	-
29	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	747.600.000	29	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	747.600.000	-
30	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	15.000.000	30	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	15.000.000	-
31	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	40.000.000	31	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	40.000.000	-
XVII	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	46.784.000	XVII	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	46.784.000	-
32	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	46.784.000	32	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	46.784.000	-
XVIII	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.505.437.000	XVIII	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.505.437.000	-
33	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.700.000	33	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.700.000	-
34	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.448.737.000	34	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.448.737.000	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.231.406.825		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.292.306.825	60.900.000
XVIII	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	169.966.000	XVIII	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	169.966.000	-
35	Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagraha, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	169.966.000	35	Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagraha, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	169.966.000	-
XIX	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.061.440.825	XIX	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.122.340.825	60.900.000

RANCANGAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			
No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan	Pagu Indikatif		No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif (=/-)
1	2	3		1	2	3	4
36	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.278.000.000		36	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.278.900.000	900.000
37	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.740.500.000		37	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.740.500.000	-
38	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	42.940.825		38	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	102.940.825	60.000.000
	JUMLAH	11.323.803.818			JUMLAH	11.411.253.818	87.450.000

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2027

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2027 sebesar Rp87.450.000, adapun ke naikan pagi anataran ranwal dan RKPD, dikarenakan ada tambahann pagu berdasarkan usulan dari forum khusus dari Forum Anak dan Forum Generasi Berencana (GENRE), dan temuan CHR, serta penyesuaian nomenklatur.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi hasil renja 2025 dan target IKU tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
V	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH				
	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Indeks Ketimpangan Gender	%	0,22	0,191	DPPPAPPKB
2	Indeks Pemberdayaan Gender	angka	74,28	74,5	DPPPAPPKB
3	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	%	100	100	DPPPAPPKB
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	Angka	73	65,6	DPPPAPPKB
2	TFR (<i>Total Fertility Rate</i> /Angka Kelahiran Total)	angka	1,24	2,16	DPPPAPPKB
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	0,77	0,77	DPPPAPPKB

Sumber : Renstra DPPPAPPKB Kab. Temanggung Tahun 2025-2029

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program pada tingkat pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang paling strategis, kritis, dan mewakili esensi dari suatu program sehingga dapat mencerminkan apakah program tersebut berjalan efektif. Indikator Kinerja Kunci DPPPAPPKB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB								
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD	%		10	DPPPAPPKB
				Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD				
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi	%		8,03	DPPPAPPKB
				Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaen/kota				
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Angka	5,62	4,9	DPPPAPPKB
				Jumlah penduduk perempuan				
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		TFR (<i>Total Fertility Rate</i> /Angka Kelahiran Total)	$5\sum ASFR$ $ASFR_i = (b_i/p_i)k$ dimana bi: jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi: jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i: kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, 1=2 untuk kelompok 20-21,..., 1=7	Angka	1,24	2,16	DPPPAPPKB

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
				untuk kelompok umur 45-49) k:bilangan konstanta biasanya 100				
		60	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	%	82,54	78,25	DPPPAPPKB
				Jumlah Pasangan Usia Subur				
		61	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Jumlah PUS yang ingin berKB tetapi tidak terlayani	%	7,44	7,57	DPPPAPPKB
				Jumlah pasangan usia subur				

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2026

BAB VI

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2027 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPPAPPKB untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DPPAPPKB Tahun 2027 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di DPPAPPKB itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan DPPAPPKB dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DPPAPPKB Tahun 2027 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2027. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPPAPPKB Tahun 2027 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2027 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp.13.606.173.164 (85,08%) dari total belanja operasi sebesar 14.991.706.842, realisasi Belanja Modal sebesar RP 645.184.200 (97,32%) dari total belanja modal sebesar RP. 662.940.400 sedangkan total realisasi belanja daerah sebesar 85,57%, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Karena capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 99,02% Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan I terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 1.505.884.455,- (13,32%) dari total belanja operasi sebesar Rp.11.322.253.819,- realisasi Belanja Modal sebesar Rp.0,- (0%) dari, belanja modal Sebesar Rp. 2.000.000,-.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2027 DPPAPPKB mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp.11.411.253.818,-

yang terdiri dari 9 program antara lain program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan kualitas Keluarga, Program Pemenuhan hak anak, Program Perlindungan khusus anak, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Program Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS).

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2027 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran DPPPAPPKB dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 24 Juli 2026

KEPALA DPPPAPPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Temanggung. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Dra. Gema Artisti Wahyudi, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700730 199001 2 002